

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BOK PUSKESMAS TEMON II
TAHUN 2025**



**PUSKESMAS TEMON II
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 dengan baik dan lancar, Penyusunan Laporan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian Manajemen tata kelola program dan kegiatan serta sebagai salah satu upaya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, khususnya di UPTD Puskesmas Temon II,

Laporan ini disusun guna memberikan informasi atas kinerja Puskesmas Temon II dalam pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025, meliputi hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi keuangan, capaian kinerja program UKM, identifikasi masalah atau kendala yang dihadapi, upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, Laporan ini juga menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 di Puskesmas Temon II,

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas pada masa yang akan datang,

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kegiatan BOK Puskesmas ini, Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,

Kulon Progo, Januari 2026

Kepala Puskesmas Temon II,



drg. Viera Joniver Thenu, M.Kes.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690609 200212 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	4
b. Tujuan	4
c. Dasar Hukum	4
BAB II GAMBARAN UMUM	
a. Penentuan alokasi BOK Puskesmas	7
b. Menu Kegiatan BOK Puskesmas	7
c. Jenis Pembiayaan BOK Puskesmas	8
d. Pencairan Dana BOK Puskesmas	9
e. Larangan Penggunaan Dana Bok Puskesmas	9
f. Evaluasi dan Pelaporan	9
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	
a. Alokasi dan Realisasi BOK Puskesmas	10
b. Capaian Pelayanan SPM	12
c. Capaian IKS	13
d. Capaian IKM	15
e. Capaian INM	16
f. Capaian Indikator Kinerja Puskesmas	17
g. Kendala dan Tindak Lanjut	18
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	
1. Permenkes - Juknis DAK NF Tahun 2025	
2. SE kemkes - Pemetaan menu DAK NF kedalam nomenklatur SIPD, Tahun 2025	
3. SK kadinkes - alokasi DAK Non Fisik Tahun 2025	

4. SK kadinkes - Target Program Tahun 2025
5. SK Puskesmas - Tim Pengelola BOK puskesmas Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, Negara bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Puskesmas dan jaringannya, Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, salah satunya adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan,

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas merupakan dukungan pemerintah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja puskesmas, Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, Indeks Keluarga Sehat (IKS) serta Sustainable Development Goal (SDG's),

B. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas

b. Khusus

- 1) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utamanya di luar gedung Puskesmas
- 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas
- 3) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) .
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1,15,5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas pada Pemerintah Daerah,
 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY 2022-2042;
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomer 26);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 13),
 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026
 23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Penentuan Alokasi Dana BOK Puskesmas

Mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023, Dinas kesehatan telah menetapkan alokasi dana BOK tiap puskesmas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk
2. Tingkat kesulitan wilayah
3. Jumlah posyandu, jumlah sekolah
4. Jumlah sasaran program
5. Jumlah desa wilayah kerja puskesmas
6. Kepatuhan pengumpulan dokumen perencanaan dan pelaporan
7. Kondisi khusus lainnya

B. Menu Kegiatan BOK Puskesmas

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan nomer PR,01,06/A/31469/2023 tentang menu DAK Non Fisik Kesehatan tahun anggaran 2025, dinyatakan bahwa menu BOK Puskesmas meliputi :

Tabel 1
Menu dan Rincian BOK Puskesmas Temon II
Tahun 2025

NO	MENU & RINCIAN
1	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal
	01 - Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumi KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas
	02 - Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumi KEK dan Risiko KEK
	03 - Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)
2	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup
	01 - Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan ibu Balita
	02 - Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan
	03 - Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk
	05 - Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)
	06 - Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak
	07 - Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan Bay/balita
	08 - Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat
	09 - Pelaksanaan skining dan intervensi hasil skining masalah Kesehatan jiwa di LKBM/Lembaga

	10 - Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang) di tingkat komunitas
	11 - Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji
	12 - Pemantauan lansia risi dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas
	13 - Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas
3	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit
	01 - Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabalkan) , serta penyehatan lingkungan
	02 - Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)
	03 - Pelayanan imunisasi
	04 - Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabalkan), KIPi dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan infeksi Saluran Pemapasan Akut terintegrasi dengan Posyandu, Posbindu
	05 - Survei vector (DBD, Malaria dan Leptospirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN
	06 - Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan
	07 - Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)
	08 - Pemantauan dan tindak lanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,
	09 - Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya
	10 - Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang
	11 - Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI)
	12 - Pemeriksaan Massal Malaria (MBS/MFS)
4	Manajemen Puskesmas
	01 - Pendampingan pelaksanaan ILP di pusku dan posyandu
	02 - Langgan SIMPUS
	03 - Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK
	04 - Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas
	05 - Transport kunjungan rumah kader posyandu
	06 - Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas
	07 - Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan
5	Insentif UKM
	01 - Pemberian insentif UKM bagi pegawai puskesmas
6	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD
	01 - Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD

C. Jenis Pembiayaan BOK Puskesmas

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas, Jenis pembiayaan tersebut meliputi :

- a. Belanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sektor
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN
- c. Belanja material pendukung kegiatan
- d. Belanja pencetakan dan penggandaan
- e. Belanja makan dan minum rapat

- f. Belanja kegiatan pertemuan
- g. Belanja barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam bentuk Belanja Modal, kegiatan kuratif dan rehabilitative, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana,

D. Pencairan dana BOK Puskesmas

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 2025, pada pasal 5 menyatakan bahwa : Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening puskesmas yang menjadi bagian dari rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

E. Larangan Penggunaan Dana Bok Puskesmas

Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk:

1. Belanja modal;
2. Pembelian obat dan vaksin;
3. Pemeliharaan gedung dan kendaraan;
4. Biaya transportasi rujukan pasien;
5. Jasa pelayanan/pemeriksaan (kecuali pemeriksaan sample terkait kesehatan masyarakat seperti kualitas air minum, makanan, udara, dan lain-lain; dan);
6. Upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

F. Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan BOK Puskesmas akan dilakukan evaluasi melalui 2 metode :

- a. Melalui forum pertemuan antara tim pengelola BOK dinas kesehatan dan tim pengelola BOK Puskesmas setiap 3 bulan sekali
- b. Melalui kunjungan lapangan ke semua puskesmas guna mengidentifikasi kendala, masalah serta tindak lanjut menyelesaikan masalah yang muncul,

Puskesmas melakukan melaporkan hasil pelaksanaan BOK Puskesmas setiap tribulan melalui Google Drive serta menyusun Laporan Tahunan,

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Alokasi dan Realisasi dana BOK Puskesmas

Alokasi dan realisasi dana BOK Puskesmas Temon II tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2
Alokasi dan Realisasi dana BOK Puskesmas Temon II
Tahun 2025

NO	MENU & RINCIAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	212,214,000	211,951,700	99,85
	01 - Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota dan puskesmas	56,700,000	56,474,600	99,60
	02 - Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	64,500,000	64,489,420	99,98
	03 - Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	91,014,000	90,987,680	99,97
2	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	120,658,000	120,036,840	99,49
	01 - Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita	97,290,000	96,738,520	99,43
	02 - Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	1,400,000	1,400,000	100,00
	03 - Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	2,000,000	2,000,000	100,00
	05 - Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	9,000,000	9,000,000	100,00
	06 - Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi Ibu dan anak	2,350,000	2,350,000	100,00
	07 - Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	100,000	100,000	100,00
	08 - Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	1,500,000	1,500,000	100,00
	09 - Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/Lembaga	1,000,000	1,000,000	100,00
	10 - Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang) di tingkat komunitas	300,000	300,000	100,00
	11 - Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	1,250,000	1,250,000	100,00
	12 - Pemantauan lansia riski dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	800,000	800,000	100,00
	13 - Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	3,658,000	3,598,320	98,10
3	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	161,405,000	159,287,300	98,69
	01 - Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	2,545,000	2,500,000	98,23
	02 - Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan	6,900,000	6,900,000	100,00

	Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)			
	03 - Pelayanan Imunisasi	4,900,000	4,900,000	100,00
	04 - Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIP1 dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan Posyandu, Posbindu	2,400,000	2,200,000	91,67
	05 - Survei vector (DBD, Malaria dan Leptospirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	9,200,000	9,200,000	100,00
	06 - Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	102,060,000	101,767,300	99,73
	07 - Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	14,400,000	14,400,000	100,00
	08 - Pemantauan dan tindak lanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	10,100,000	8,500,000	84,16
	09 - Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	5,900,000	5,900,000	100,00
	10 - Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	3,000,000	3,000,000	100,00
	11 - Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI)	0	0	0
	12 - Pemeriksaan Massal Malaria (MBS/MFS)	0	0	0
4	Manajemen Puskesmas	62,716,000	61,018,643	97,29
	01 - Pendampingan pelaksanaan ILP di pusku dan posyandu	3,800,000	3,800,000	100,00
	02 - Langganan SIMPUS	4,600,000	3,500,000	72,92
	03 - Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK	1,200,000	1,200,000	100,00
	04 - Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	8,336,000	8,120,408	97,41
	05 - Transport kunjungan rumah kader posyandu	16,020,000	16,000,000	99,88
	06 - Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	13,860,000	13,751,295	99,22
	07 - Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	14,700,000	14,646,940	99,64
5	Insentif UKM	112,224,000	75,882,887	67,72
	01 - Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas	112,224,000	75,882,887	67,72
6	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	4,403,000	4,336,080	98,48
	01 - Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	4,403,000	4,336,080	98,48
	TOTAL	673,620,000	632,513,460	93,90

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian kegiatan BOK 2025 sebesar 93,90%, Beberapa menu yang capaiannya rendah yakni insentif UKM yakni 67,72%, Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana bulanan karena bersamaan kegiatan lain, keterbatasan waktu dan petugas, Selain itu, juga karena penyerapan insentif dititikberatkan pada petugas ASN padahal banyak kegiatan yang melibatkan Non ASN,

B. Capaian Pelayanan SPM

Pada Tahun 2019 Kementerian Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Capaian Pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas Temon II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Target dan Capaian SPM Kesehatan di Puskesmas Temon II
Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Indikator SPM	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	130	128	98,46	107	105	98,13	106	88	83,02
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	130	129	99,23	107	108	99,07	104	88	84,62
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	130	130	100,00	106	106	100	104	87	83,65
4	Pelayanan kesehatan balita	552	488	88,04	550	526	95,64	496	515	103,83
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2.478	2.451	98,91	2.418	2.407	99,55	2.495	2.407	96,47
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.700	981	57,71	1.248	1.248	100	1.248	1.618	129,65
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	1.965	1.482	75,42	1.961	1.772	90,36	1.949	1.775	91,07
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	899	174	19,35	895	314	35,08	174	217	124,71
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	359	121	33,70	381	164	43,04	119	129	108,40
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	33	19	57,58	35	35	100	39	34	87,18
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	136	51	37,50	141	129	91,4	123	163	132,52
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	243	243	100,00	262	262	100	257	219	85,21

Sumber : Data Profil Puskesmas

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator SPM di atas 80% bahkan ada yang melampaui target yakni di atas 100% seperti pelayanan kesehatan balita, kesehatan pada usia produktif, pelayanan penderita hipertensi, serta pelayanan kesehatan orang dengan TB

Kendala, masalah dan tindak lanjut dalam penerapan pelayanan SPM di Puskesmas adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Kendala, Masalah dan Tindak Lanjut Penerapan Pelayanan SPM di Puseksmas

No	Aspek	Kendala & Masalah	Tindak Lanjut
1	Pendataan sasaran	Tidak ada permasalahan	Lanjutkan
2	Ketersediaan Sarana prasarana kesehatan	Tidak ada permasalahan	Lanjutkan
3	Ketersediaan BMHP	Tidak ada permasalahan	Lanjutkan
4	Ketersediaan SDM Kesehatan	Tidak ada permasalahan	Lanjutkan
5	Dukungan lintas sektor	Tidak ada permasalahan	Lanjutkan
6	Dukungan masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat teratur	Lanjutkan

C. Capaian IKS (Indeks Keluarga Sehat)

Capaian IKS di Puskesmas Temon II adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian IKS di Puskesmas Temon II
Tahun 2023, 2024, 2025

NO	INDIKATOR	2023	2024	2025
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	71,18 %	41,74%	42,27%
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	99,02 %	98,69%	98,91%
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	100,00 %	100,00%	100,00%
4	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	90,07 %	90,71%	88,41%
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	99,46 %	99,64%	99,78%
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	65,12 %	44,26%	50,91%
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	14,80 %	14,22%	29,03%
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	60,00 %	83,33%	100,00%
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	50,24 %	51,09%	53,60%
10	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,89 %	83,58%	82,77%
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	96,42 %	96,35%	98,82%
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,90 %	98,98%	98,92%

Tabel 6
Capaian IKS di Wilayah Puskesmas Temon II
Tahun 2023, 2024, 2025

NO	URAIAN	2023	2024	2025	KETERANGAN
1	Jml KK	3,501	3,576	3,576	
2	Jml KK sehat	1,064	995	1,083	
3	Jml KK pra sehat	2311	2,444	2,373	
4	Jml KK tdk sehat	126	137	120	
5	IKS	0,30	0,28	0,30	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ada kenaikan IKS di tiap tahunnya, Kendala, masalah dan tindak lanjut dalam pencapaian indikator PISPK di Puskesmas adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Kendala dan tindak lanjut dalam PISPK di Puskesmas Temon II

No	Aspek	Kendala & Masalah	Tindak Lanjut
1	Pendataan	Data Sasaran Baru, meninggal, pindah domisili belum bisa terpantau	Pendataan Ulang dan pelaporan oleh kader adanya sasaran baru, meninggal dan pindah domisili
2	Pemutakhiran data di aplikasi PISPK	Petugas entry terbatas , butuh waktu khusus, aplikasi baru	Pembentukan tim entry data PISPK, penyesuaian aplikasi baru
3	Kesiapan petugas	Petugas tidak siap setiap waktu untuk entry data baru, dikarenakan beban ganda dengan pelayanan	Orientasi aplikasi PISPK baru
4	Pelaksanaan intervensi	Pelaksanaan intervensi masih kurang dikarenakan belum semua data terentry sehingga belum diketahui permasalahan pada setiap sasaran	Share keluarga pra sehat dan tidak sehat ke petugas Darbin untuk dilakukan intervensi
5	Koordinasi lintas program	Koordinasi belum maksimal karena PISPK jarang dibahas pada pertemuan tertentu	Review ulang tentang PISPK dan Koordinasi pelaksanaan dari pendataan hingga intervensi
6	Koordinasi lintas sektor	Koordinasi belum maksimal karena PISPK jarang dibahas pada pertemuan tertentu	Review ulang tentang PISPK dan Koordinasi pelaksanaan dari pendataan hingga intervensi

D. Capaian IKM

Tabel 8
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025

NO	KOMPONEN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Persyaratan Pelayanan	3	3,36	Baik
2	Kemudahan Prosedur	3	3,38	Baik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3	3,387	Baik
4	Kewajaran Biaya	3	3,4	Baik
5	Kesesuaian Hasil Pelayanan	3	3,42	Baik
6	Kompetensi Petugas	3	3,547	Sangat Baik
7	Sikap Petugas	3	3,54	Sangat Baik
8	Kelengkapan Sarana Aduan	3	3,44	Baik
9	Kualitas/Kondisi Sarana	3	3,37	Baik
10,	Transparansi Pelayanan	3	3,5	Sangat Baik
11	Integritas Petugas Pelayanan	3	3,553	Sangat Baik
	Hasil IKM : 86,136 Mutu Pelayanan : Baik			

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian untuk komponen IKM sudah melampaui target, sedangkan Hasil IKM sudah baik,

Tabel 9
Kendala dan Tindak Lanjut Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Aspek Pelayanan	Kendala Utama	Tindak lanjut
Sistem Antrean	Penumpukan pasien di jam pagi dan antrean fisik yang masih panjang bagi lansia,	Integrasi antrean online melalui aplikasi (seperti JKN Mobile atau aplikasi lokal) yang disinkronkan dengan layar TV di ruang tunggu,
Sarana Prasarana	Fasilitas ruang tunggu yang kurang nyaman dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di gedung lama,	Revitalisasi ruang tunggu ramah anak dan lansia, serta perbaikan jalur ramp dan toilet disabilitas sesuai standar Permenpan RB,
SDM & Sikap Petugas	Keluhan terkait keramahan petugas (attitude) akibat beban kerja yang tinggi (burnout),	Pelatihan Service Excellence secara berkala dan penerapan sistem reward & punishment berdasarkan survei kepuasan harian,
Waktu Tunggu Obat	Proses penyiapan obat racikan di farmasi yang memakan waktu lama,	Digitalisasi resep (E-Resep) dari meja dokter langsung ke farmasi dan layanan antar obat (kerjasama dengan kurir lokal),
Transparansi Biaya	Kurangnya pemahaman pasien umum mengenai rincian biaya non-BPJS,	Digitalisasi tarif layanan melalui kiosk informasi dan papan

		pengumuman elektronik yang selalu update,
Penanganan Keluhan	Saluran pengaduan yang tidak responsif atau hanya formalitas,	Optimalisasi kanal aduan via WhatsApp respons cepat dan media sosial, serta tindak lanjut yang diumumkan secara terbuka,

E. Capaian Indeks Nasional Mutu (INM) Tahun 2025

Capaian dari Indeks Nasional Mutu Puskesmas Temon II di Tahun 2025 yakni :

Tabel 10
Capaian Indeks Nasional Mutu (INM) Tahun 2025

NO	KOMPONEN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT)	85	90,18	Tercapai
2	Kepatuhan Penggunaan APD	100	100	Tercapai
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100	100	Tercapai
4	Keberhasilan Pengobatan Pasien TB	100	0	Tidak ada kasus
5	Ibu Hamil Mendapat Pelayanan ANC Sesuai Standar	100	83,3	Terdapat ibu hamil yang tidak periksa ke faskes
6	Kepuasan Pengguna Layanan	76	84,64	Tercapai

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian INM sudah memenuhi target kecuali komponen Ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC karena memang ada pasien yang tidak periksa ke puskesmas.

Kendala dalam meningkatkan INM antara lain :

Tabel 11
Kendala dan Tindak Lanjut dalam Meningkatkan INM

Indikator (INM)	Kendala Utama	Tindak lanjut
Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT)	Tidak ada kendala yang berarti dan kadang faktor lupa dalam kebersihan tangan	Audit rutin berkala, kampanye "Hand Hygiene Hero",
Kepatuhan Penggunaan APD	Ketidaknyamanan penggunaan APD dalam waktu lama dan kurangnya pengawasan,	Sosialisasi APD sesuai level risiko dan penyediaan APD yang lebih ergonomis/nyaman,
Kepatuhan Identifikasi Pasien	Petugas merasa sudah "kenal" pasien (terutama pasien rutin) sehingga tidak melakukan konfirmasi ulang,	Penerapan gelang identitas atau penggunaan sistem barcode pada rekam medis elektronik (RME),

Keberhasilan Pengobatan Pasien TB	Tidak adanya kasus TB di tahun berjalan dan pengobatan selesai pada kasus tahun lalu	-
Ibu Hamil Mendapat Pelayanan ANC Sesuai Standar	Kesadaran ibu hamil rendah	Inovasi jemput bola (Mobile ANC) dan penguatan aplikasi pemantauan ibu hamil berbasis komunitas,
Kepuasan Pengguna Layanan	Waktu tunggu yang lama dan keterbatasan ruang tunggu yang nyaman,	Optimasi pendaftaran online (Sikuat/aplikasi lokal) dan penataan alur pelayanan agar lebih efisien,

F. Capaian Indikator Kinerja Puskesmas

Capaian indikator program yang digunakan dalam Penilaian Kinerja Puskesmas antara lain meliputi :

Tabel 12
Capaian Indikator Kinerja Puskesmas
Tahun 2025

No	Upaya Pelayanan Kesehatan, Manajemen dan Mutu	Rata-rata Program	Rata-rata Upaya
1	2	3	4
A	Manajemen		7,90
	Klaster 1		7,94
1	Inti puskesmas	8,20	
2	Arsip	3,5	
3	SDM	8,33	
4	Sarpras & Perbekalan Kesehatan	10,00	
5	Mutu Pelayanan	9,57	
6	Keuangan & BMD	9,40	
7	Sistim Informasi Digital	8,50	
8	Jejaring	7,00	
9	Pemberdayaan Masyarakat	7,00	
A 2	Lintas Klaster		7,86
1	Kesehatan gigi dan mulut	7,75	
2	Gawat Darurat	7,00	
3	Kefarmasian	7,92	
4	Labkesmas	9,63	
5	PISPK	7,00	
B	Klaster Siklus Hidup		89,11
1	Bumil, bulin dan ibu nifas	94,76	
2	Balita & APRAS	84,75	

3	Anak usia sekolah & remaja	98,76	
4	Usia dewasa	91,37	
5	Lanjut Usia	75,91	
C	Klaster P2 Menular dan Kesling		89,75
1	SKDR	69,03	
2	PEnyehatan Lingkungan	100,00	
3	Penyehatan Lingkungan	89,97	
4	Analisis PWS	100,00	
D	Lintas Klaster		83,53
1	Kesehatan gigi & mulut	73,20	
2	Gawat Darurat	92,11	
3	Kefarmasian	89,42	
4	Labkesmas	80,00	
5	Rawat Inap	100,00	
6	Penanggulangan Krisis	50,00	
7	Fisioterapi	100,00	

G. Kendala dan Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Kegiatan BOK Puskesmas

Kendala dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas Temon II dapat diidentifikasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 13

Kendala dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas Temon II

NO	ASPEK	MASALAH / KENDALA	TINDAK LANJUT
1	Keterlambatan dalam proses pembahasan usulan BOK	Pembahasan usulan BOK Puskesmas melalui zoom dan dilanjutkan dengan beberapa kali revisi TOR & RAB, sehingga cukup menyita waktu, Rambu - rambu rincian belanja yang dituang di RAB tidak secara jelas disampaikan di awal sebelum desk berlangsung.	Mengusulkan ke kemenkes melalui dinas kesehatan, agar time line pembahasan usulan dimajukan dan proses pembahasan & revisi agar lebih disederhanakan,
2	Koordinasi lintas program	Koordinasi lintas program belum bisa optimal, sehingga kegiatan yang sifatnya lintas program belum bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena kesibukan dan agenda yang padat dari masing-masing program, kejar tayang.	Meningkatkan koordinasi lintas program dan membangun komitmen bersama
3	Pengaturan jadwal kegiatan	Pengaturan jadwal kegiatan di puskesmas belum bisa berjalan optimal, karena	Meningkatkan koordinasi lintas program

		<p>masing-masing programmer punya agenda kegiatan yang padat, Kesulitan pengaturan jadwal karena harus mempertimbangkan beberapa hal : jadwal nara sumber luar, jadwal penggunaan aula, jadwal kegiatan dari dinas kesehatan kabupaten, dinkes propinsi, serta kegiatan dengan lintas sektor, Agenda kegiatan dari kabupaten dan propinsi yang kadang mendadak, sehingga kesulitan dalam pengaturan jadwal kegiatan di tingkat puskesmas,</p>	
5	Pelaporan kegiatan	<p>Keterlambatan pengiriman informasi hasil pelaksanaan kegiatan dari tiap program, sehingga menghambat proses penyusunan dan pengiriman laporan kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan,</p>	<p>Meningkatkan koordinasi lintas program</p>

BAB III PENUTUP

Puskesmas Temon II memperoleh alokasi dana BOK Puskesmas sebesar Rp,673,620,000,-, dengan Realisasi dana BOK Puskesmas sebesar Rp,632,513,450,- (93,90%),

Capaian SPM yang masih perlu mendapat perhatian antara lain : pelayanan kesehatan ibu hamil karena ada yang tidak periksa ke faskes.

Capaian IKS yang masih perlu mendapat perhatian antara lain : penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur karena masyarakat merasa sehat sehingga jarang datang untuk memeriksakan kesehatannya.

Guna meningkatkan keberhasilan dalam pemanfaatan dana BOK Puskesmas, diperlukan kesiapan regulasi, komitmen bersama serta koordinasi yang baik pada lintas program dan lintas sektor,

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas ini kami susun, Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak,

Kulon Progo, Januari 2026

Kepala Puskesmas Temon II,



dr. Viera Juniver Thenu, M.Kes.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIK 19690609 200212 2 004